

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aparat negara harus mengembangkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan barang atau jasa. Inovasi berdasarkan digital banyak digunakan di Indonesia. Targetnya agar semua pihak memiliki keterampilan yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan semua pekerjaan.¹

Pengadaan barang dan jasa publik merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan pembangunan. Di lihat dari berbagai sudut, kemajuan Indonesia tidak lepas dari kegiatan tersebut. Di bidang ekonomi, pengembangan peralatan dan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pembelian barang dan jasa publik. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa publik berfungsi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan juga membantu untuk mengatasi beberapa masalah sosial. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia diiringi dengan perkembangan otonomi daerah, maka perlu adanya peningkatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan pemerintah dapat berupa

¹ Nuryanti Mustari, Wahdania Suardi, and Ulfiah Syukri, *'Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia'*, *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10.3 (2022), 193–200 <<https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.702>>. Di akses pada tanggal 14 Agustus 2023

sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Kebutuhan tersebut dapat diwakili melalui pembelian barang/jasa.

Penyebaran internet merupakan dampak dari perkembangan infrastruktur teknologi informasi. Dari perkembangan tersebut, muncul paradigma baru dengan menciptakan proses bisnis khususnya menggunakan infrastruktur internet dan teknologi informasi. Kemajuan yang dilakukan oleh bisnis melalui sarana teknologi informasi yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menggunakan ruang virtual sebagai tempat untuk beroperasi. Beberapa perusahaan *e-commerce* ada yang memberikan ruang bagi pelaku bisnis untuk memajang produknya disitus *e-commerce* nya. Hal ini mengakibatkan terciptanya pasar elektronik yang kita sebut *marketplace*. Pengaktifan pasar juga diikuti oleh pemerintah Republik Indonesia. Teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah disebut *e-government*, di mana ini merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah secara elektronik. Salah satu lembaga negara yaitu lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) Juga menerapkan toko online yaitu *e-katalog*.²

E-katalog merupakan aplikasi internet yang dibuat oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aplikasi ini adalah satu-satunya sistem dalam kerangka akuisisi otoritas publik. E-katalog bermaksud untuk bekerja sama dengan otoritas publik baik untuk tenaga kerja maupun hak produk. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang mempengaruhi

² Kiki Emyrasari, Purwono Hendradi, and Setiya Nugroho, '*Evaluasi Usability Website E-Katalog Lokal LKPP Dengan Menggunakan Metode Usability Testing*', 2023, 584–89.

masyarakat Indonesia. UMKM tersebut memiliki komitmen terhadap bisnis, struktur produk domestik bruto (PDB), jenis komoditi dan nilai ekspor. Saat ini, transaksi UMKM dilakukan dalam jangka waktu yang telah dijadwalkan, sangat penting untuk mengatasi masalah yang sering mereka alami tentang pemahaman sasaran pasar dan juga pengembangan bisnis yang membatasi minimnya jumlah pembeli, UMKM diyakini dapat melihat peluang serta potensi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Inpres tersebut terdapat beberapa poin yang diharapkan dapat segera dilaksanakan :

- a. Mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- b. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 % nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- c. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri, dan produk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha koperasi pada katalog sektoral atau lokal.

Dalam hal menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang pengadaan barang dan jasa tersebut pihak-pihak yang ada dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cepat merespon untuk dapat mempercepat pelaksanaannya. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam hal implementasi percepatan Inpres PBJ tersebut karena pada pemerintah daerah lah yang menaungi usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah kabupaten atau kota sangat penting untuk mengkoordinasikan, mengorganisasikan para pelaku UMKM untuk berperan serta dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dalam hal ini merupakan pihak yang diinstruksikan oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipilih peneliti karena keterlibatan terhadap pelaku umkm masih sangat minim dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tersebut maka dikeluarkan sebuah regulasi turunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Instruksi Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring dengan menginstruksikan kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk berbelanja di e-katalog lokal. Meskipun sudah ada regulasi turunan atau teknis dari Instruksi Presiden yaitu Instruksi Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2023 tetap saja keterlibatan umkm agar bergabung di e-katalog lokal masih minim. Jumlah pelaku usaha

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang terdaftar di e-katalog LKPP Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 126 pelaku usaha.

Tabel 1.1 Jumlah Penyedia yang Terdaftar di E-katalog Lokal LKPP

Kabupaten Ogan Komering Ulu

No	Nama Etalase	Jumlah Penyedia
1.	Makanan dan Minuman Kabupaten Ogan Komering Ulu	55
2.	Jasa Keamanan kabupaten Ogan Komering Ulu	1
3.	Jasa Kebersihan Kabupaten Ogan Komering Ulu	5
4.	Beton Ready Mix Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
5.	Bahan Material Kabupaten Ogan Komering Ulu	3
6.	Alat Tulis Kantor Kabupaten Ogan Komering Ulu	23
7.	Bahan Pokok Kabupaten Ogan Komering Ulu	4
8.	Servis Kendaraan Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
9.	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Ogan Komering Ulu	7
10.	Aspal Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
11.	Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
12.	Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
13.	Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	18
14.	Jasa pengelolaan Sampah Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
15.	Alat dan Mesin Pertanian Pemerintah daerah Kabupaten Ogan komering Ulu	0
16.	Benih Holtikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	1
17.	Benih Tanaman Pangan Pememrintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
18.	Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu	0
19.	Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	0
20.	Peralatan Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	3
21.	Alat dan Bahan Kebersihan Kabupaten Ogan Komering Ulu	1

22.	Cetak dan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	2
Jumlah		126

(Sumber : Katalog Lokal LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Dari data yang dihimpun oleh sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dijelaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah yang berkontribusi dalam percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sangat minim. Berdasarkan data yang peneliti ambil di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ogan Komering Ulu bahwa sekitar ada lebih dari 45.334 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu sedangkan pelaku UKM yang bergabung di e-katalog lokal hanya berjumlah 126 penyedia. Jumlah tersebut dapat terbilang sangat minim keterlibatan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam e-katalog lokal. Selain itu, ada 11 etalase yang belum terisi oleh penyedia atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu beton ready mix, servis kendaraan, aspal, seragam sekolah, beton precast, jasa pengelolaan sampah, alat dan mesin pertanian, benih tanaman pangan, pemeliharaan bangunan gedung, benih tanaman perkebunan, dan etalase hewan ternak.

Maka dari itu, diperlukan empat variabel yang mendukung terciptanya peningkatan peran umkm dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik seperti komunikasi yang baik, sumber daya yang mumpuni, kecendrungan pelaksana yang tepat sasaran, dan struktur birokrasi yang cepat dalam melayani masyarakat. Jika empat variabel ini dapat diimplementasikan

dalam melaksanakan suatu kebijakan maka tujuan kebijakan yaitu terwujudnya meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik akan cepat terwujud.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa identifikasi permasalahannya adalah belum meningkatnya peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bergabung di e-katalog lokal.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dan permasalahan yang terjadi dapat dibuat rumusan masalahnya adalah “Bagaimana implementasi pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ?”.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar meningkatnya peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah pada pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui implementasi pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. Mengetahui meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bergabung pada e-katalog lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan terkait implementasi pelaksanaan e-katalog lokal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan implementasi pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk pelaku UMKM agar berperan serta ikut bergabung dalam e-katalog lokal.
3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk terus konsisten dalam mensosialisasikan penggunaan e-katalog lokal bagi pelaku UMKM.